

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah Di Inggris

Sejarah awal masuknya Islam di Inggris, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Perancis yang berawal dari proses imigrasi. Hampir dari seluruh fase/ gelombang masuknya Islam ke Inggris didominasi dari para imigran. Fase awal masuknya Islam ke Inggris yaitu pada tahun 1869 yang dikenal sebagai tahun dibukanya Terusan Suez. Akibat langsung dari perdagangan dan pelayaran ini menyebabkan terbukanya hubungan langsung antara Eropa dengan Asia dan Afrika. Para pekerja dari Yaman lah yang sangat menonjol dalam aktifitas perdagangan baik sebagai pelaut maupun kuli dalam pelabuhan.

Mereka berlayar ke Inggris dan menetap di kota Cardiff, Liverpool dan Pollockshields. Kegiatan perdagangan ini, membuat para imigran India turut andil dalam aktifitas ini. India yang pada waktu itu masih berada di bawah jajahan Inggris, sementara Pakistan dan Bangladesh masih menjadi bagian dari India. Oleh karena itu, Penduduk muslim di Inggris di dominasi oleh para imigran yang berasal dari India, Pakistan dan Bangladesh (Mundzir, 2015:102).

Pada tahun 1976, setelah konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz, Jeddah di

Makkah Al-Mukarramah Arab Saudi, yayasan Islamic Foundation Laceister, Inggris mendirikan unit ekonomi Islam sebagai pusat penelitian pertama mengenai masalah ekonomi Islam .

Pusat penelitian ini diikuti oleh pusat penelitian Ekonomi Islam Internasioanal *The Interntional Centre For Islamic Economics* (CRIE) di Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1977. Yayasan Islam Inggris kemudian menerbitkan karya-karya besar oleh perintis ekonomi Islam, perbankan dan keuangan seperti Najettullah Siddiqi, Umer Chapra, dan lainnya. Dalam hal ini juga menyelenggarakan konferensi, seminar dan lokakarya tentang topik ini yang bekerjasama dengan IDB, IRTI dan Universitas Loughborough (Belouafi & Chachi, 2014:47-48).

Pada tahun 1981, Asosiasi Internasional untuk ekonomi Islam didirikan di Leicester, Inggris. Asosiasi ini bertanggungjawab atas penyelenggaraan konferensi internasional mengenai ekonomi Islam. Konferensi ke-empat diselenggarakan di Loughborough, Inggris pada tahun 2000. Konferensi terkahir (8 dan 9) diseleggrakan di Qatar pada Tahun 2011 dan di Turki pada tahun 2013. Di tahun 1982, Inggris mengizinkan Dar Al—Mal Al-Islami (DMI) yang berbasis di Jenewa (Swiss) untuk membuka kantor di London dan untuk memobilisasi dana investasi perusahaan di Luksemburg dan perusahaan Takaful Luksemburg (Belouafi & Chachi, 2014:48).

DMI didirikan pada tahun 1981 di bawah undang-undang Bahama dengan kantor pusatnya di Jenewa (Swiss) dengan tujuan untuk menjalankan urusan bisnis sesuai dengan hukum, prinsip dan tradisi Islam

serta menawarkan berbagai macam layanan keuangan Islam. Dengan memiliki jaringan luas yang menjangkau lebih dari empat benua, dengan anak perusahaan daerah yang terintegrasi dengan baik memungkinkannya merespon kebutuhan dan kondisi bisnis lokal. Berdasarkan struktur geografis ini, Group DMI dan asosiasi lainnya bertidak sebagai jembatan keuangan antara pusat keuangan negara Islam terkemuka di dunia (Belouafi & Chachi, 2014:48).

Pada tahun 1983, perusahaan Takaful UK didirikan sebagai anak perusahaan DMI, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang berada di Inggris, dengan menawarkan investasi Islam yang disediakan oleh Takaful S.A di Luksemburg. Pendirian Takaful ini untuk mereka yang menentang untuk membeli sebuah produk yang mereka anggap terkontaminasi dengan Riba atau Bunga. Takaful yang beroperasi di Birmingham, Inggris menawarkan layanan keuangan Islam yang tersedia pada spektrum yang luas dari penyedia produk, di samping layanan Takaful yang ditawarkan oleh Takaful S.A di Luksemburg (Belouafi & Chachi, 2014:48).

Masih di tahun yang sama 1983, Bank of England (BOE) mengizinkan Al-Baraka beroperasi di Inggris. Bank ini didirikan pada Tahun 1982 oleh perusahaan investasi Al-Baraka yang berbasis di Jeddah Arab Saudi. Bank ini merupakan satu-satunya bank yang menawarkan layanan perbankan syariah secara khusus di Inggris berdasarkan Undang-Undang perbankan tahun 1987. Al-Baraka kemudian membuka dua cabang di London pada

tahun 1988 dan 1989, dan juga di Birmingham pada tahun 1991 (Belouafi & Chachi, 2014:48).

Inisiatif utama Bank Al-Baraka yaitu dalam pembiayaan perumahan karena sudah mulai menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk kliennya atas kepemilikan rumah dari tahun 1988 dan seterusnya. Al-Baraka dan kliennya akan menandatangani kontrak bersama-sama untuk membeli rumah atau flat. Nasabah akan melakukan pembayaran bulanan atau triwulanan selama periode 10 sampai 20 tahun. Pada akhir tahun 1993 Bank Al-Baraka akhirnya ditutup operasionalnya sebagai bank karena kebijakan total aset perbankan oleh BOE meski terus beroperasi sebagai perusahaan investasi (Belouafi & Chachi, 2014:48-49).

Pada tahun 1995, Universitas Loughborough menjadi universitas barat pertama yang memperkenalkan dan menerapkan sistem pembelajaran perbankan syariah dan keuangan pada tingkat Master, bekerjasama dengan yayasan Islam UK yang mensponsori penelitian untuk melakukan pengajaran dan pengawasan bagi mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan dalam gelar master mereka.

Pada tahun yang sama, yayasan Islam UK bersama universitas Loughborough menyelenggarakan sebuah konferensi besar yang bekerjasama dengan Islamic Development Bank, di mana beberapa Gubernur bank sentral dari negara-negara muslim seperti Malaysia, dan United Emirate Arab (UEA) bertemu dengan Gubernur Bank of England dan beberapa ilmuwan untuk membahas kemungkinan mengizinkan bank-

bank Islam untuk beroperasi di Inggris guna melayani populasi muslimnya (Belouafi & Chachi, 2014:49).

Pada tahun 1997, United Bank of Kuwait menambahkan kontribusi lainnya dalam tersedianya produk keuangan Islam di Inggris dengan membentuk divisi khusus Islam yang diberi nama Unit Perbankan Investasi Islam. Bank Kuwait kemudian bergabung dengan Bank Al-Ahli yang sekarang dikenal sebagai Bank persekutuan Al-Ahli. Produk pembelian rumah di bank ini diberi nama Manzil, yang berarti “tempat tinggal”. Awalnya, Manzil hanya menawarkan produk dengan akad Murabahah, akan tetapi pada tahun 1999, bank mengenalkan versi pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad Ijarah yang ternyata jauh lebih populer (Belouafi & Chachi, 2014:49).

Di bawah ini merupakan data kuantitatif tentang gambaran perkembangan lembaga keuangan Islam di Inggris:

Tabel 1. Perkembangan lembaga keuangan Islam di UK

No	Tahun	Lembaga Keuangan Islam
1	1982	-Al-Baraka International Bank
2	1996	-United Bank of Kuwait -Al-Baraka International Bank
3	2003	-HSBC Amanah -United Bank of Kuwait -Al-Baraka International Bank - Rosette Merchant Bank
4	2004	-ABC International Bank -Islamic Bank Of Britain -Bank of Ireland -HSBC Amanah -United Bank of Kuwait -Rosette Merchant Bank -Al-Baraka International Bank
5	2005	-European Islamic Investment Bank (EIIB) -ABC International Bank

		<ul style="list-style-type: none"> -Islamic Bank Of Britain -Bank of Ireland -HSBC Amanah -United Bank of Kuwait - Rosette Merchant Bank -Al-Baraka International Bank -Lloyds Bank
6	2007	<ul style="list-style-type: none"> -Bank of The London and The Middle East (BLME) -European Islamic Investment Bank (EIIB) -ABC International Bank -Islamic Bank Of Britain -Bank of Ireland -HSBC Amanah -United Bank of Kuwait - Rosette Merchant Bank -Al-Baraka International Bank -Lloyds Bank
7	2008	<ul style="list-style-type: none"> -QIB.UK (European Finance House) -Gethouse Bank -British Islamic Insurance Co -Bank of The London and The Middle East (BLME) -European Islamic Investment Bank (EIIB) -ABC International Bank -Islamic Bank Of Britain -Bank of Ireland -HSBC Amanah -United Bank of Kuwait - Rosette Merchant Bank -Lloyds Bank -Al-Baraka International Bank
8	2013	<ul style="list-style-type: none"> - Abu Dhabi Islamic Bank -QIB.UK (European Finance House) -Gethouse Bank -British Islamic Insurance Co -Bank of The London and The Middle East (BLME) -European Islamic Investment Bank (EIIB) -ABC International Bank -Islamic Bank Of Britain -Bank of Ireland -HSBC Amanah -United Bank of Kuwait - Rosette Merchant Bank -Lloyds Bank -Al-Baraka International Bank -Cobalt Underwriting
9	2015	<ul style="list-style-type: none"> - Abu Dhabi Islamic Bank

		<ul style="list-style-type: none"> -QIB.UK (European Finance House) -Gethouse Bank -British Islamic Insurance Co -Bank of The London and The Middle East (BLME) -European Islamic Investment Bank (EIIB) -ABC International Bank -Islamic Bank Of Britain -Bank of Ireland -HSBC Amanah -United Bank of Kuwait -Al-Baraka International Bank -Cobalt Underwriting - Rosette Merchant Bank -Lloyds Bank -Asosiasi asuransi Islam london didirikan
--	--	---

Sumber : UK Excellent in Islamic Finance gov.uk/ukti Diakses Tanggal 13/10/2017

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan lembaga keuangan Islam di negara Inggris semakin berkembang dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan lembaga keuangan Islam yang bertambah dari tahun ke tahun. Banyaknya lembaga keuangan Islam yang juga membuka kantor cabangnya di negara Inggris semakin membuat Inggris menjadi negara yang bersahabat untuk lembaga keuangan Islam. Di Inggris sendiri saat ini sudah memiliki 5 bank yang memenuhi persyaratan syariah (telah sepenuhnya syariah) yang beroperasi.

Sementara itu, banyak pemerintahan di Eropa merealisasikan kebijakan finansial untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. Inggris misalnya, pemerintah Inggris sendiri mengeluarkan uangnya sebesar £37 miliar untuk menyelamatkan bank-bank Inggris, seperti bank HSBC, Lloyds TSB dan Royal Bank of Scotland (kompas.com 29/12/2017).

Tabel 2. Data aset lima bank yang sepenuhnya syariah di Inggris

No	Bank	Total Aset (Miliar)
1.	Bank of London and the Middle East (BLME)	\$2,149
2.	Al Rayan Bank (Islamic Bank of Britain)	\$1,005
3.	Gatehouse Bank	\$0,409
4.	Qatar Islamic Bank United Kingdom (QIB UK)	\$0,35
5.	Abu Dhabi Islamic Bank United Kingdom (ADIB UK)	\$0,146
	Total aset perbankan syariah di Inggris (2016)	\$4,5

Sumber : Data diolah sendiri

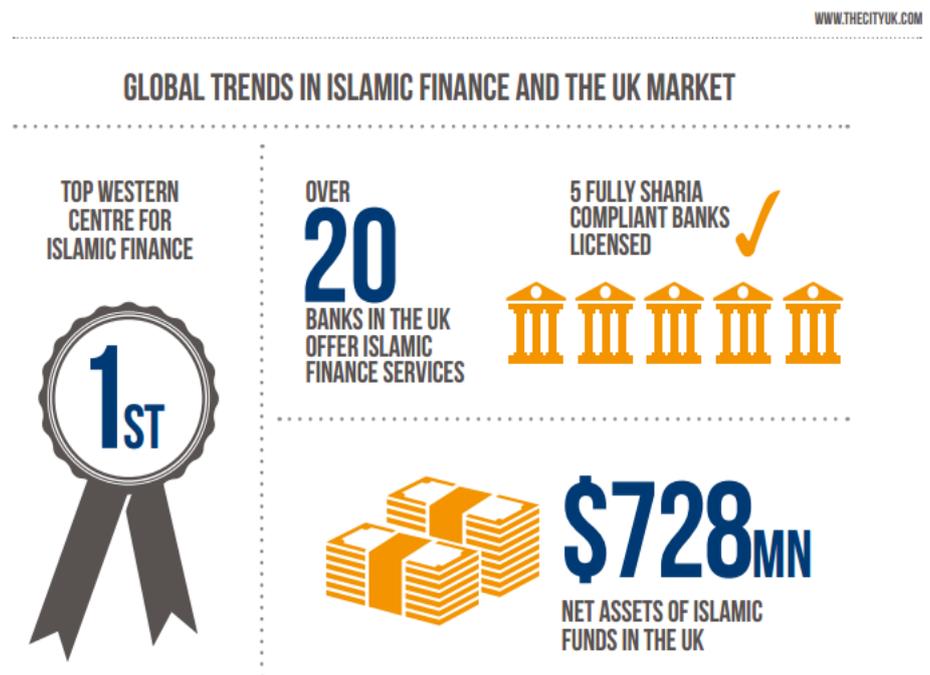
Data tabel 5 di atas menjelaskan bahwa saat ini ada lima bank yang memenuhi persyaratan syariah (sepenuhnya syariah) di Inggris. Total aset perbankan syariah sekitar \$4,5 Miliar pada tahun 2016. Bank yang memenuhi persyaratan syariah tersebut antara lain, Bank of London and the Middle East (BLME) dengan total aset sebanyak \$2,149 Miliar, Al Rayan Bank dengan total aset sebanyak \$1,005 Milyar, Gatehouse Bank dengan total aset sebanyak \$0,409 Miliar, Qatar Islamic Bank United Kingdom (QIB UK) dengan total aset sebanyak \$0,35 Miliar, dan Abu Dhabi Islamic Bank United Kingdom (ADIB UK) dengan total aset sebanyak 0,146 Miliar (Irvani 2016:127-128).

1. Al-Rayyan Bank adalah bank ritel dan merupakan satu-satunya bank syariah yang memiliki lima cabang serta memiliki sekitar 60.000

nasabah. Bank ini menawarkan beragam produk keuangan syariah di Inggris (TheCityUK, 2017:10).

2. Bank of London dan The Middle East (BLME) adalah bank Inggris yang berbasis syariah yang berlokasi di London. Penawaran BLME ini mencakup perbankan korporasi, *treasury* dan *wealth management* yang terdiri dari pengelolaan perbankan dan aset swasta (TheCityUK, 2017:10).
3. Qatar Islamic Bank (QIB) UK, anak perusahaan dari Qatar Islamic Bank Inggris yang menawarkan berbagai produk pembiayaan dan investasi syariah untuk nasabah muslim dan nasabah non-muslim. Bank ini menyediakan layanan perbankan investasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam termasuk keuangan perdagangan, ekuitas swasta dan pengelola aset kepada nasabah mulai dari individu hingga dana kekayaan investor institusional lainnya (TheCityUK, 2017:10).
4. Gethouse Bank merupakan Bank investasi syariah yang beroperasi di pasar modal, real estate, aset keuangan, bisnis perbendaharaan dan layanan konsultasi syariah. Bank ini mengelola aset real estate senilai \$1,2 miliar secara global (TheCityUK, 2017:11).
5. Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) sedang berambisi mengejar pertumbuhan yang strategis. ADIB sudah mengoperasikan jaringan cabang yang besar di Timur Tengah, Mesir, Iran, Arab Saudi dan Qatar. ADIB UK didirikan untuk memberikan layanan bank kepada

nasabah di Inggris – satu-satunya negara di Luar Timur Tengah di mana ADIB beroperasi (TheCityUK, 2017:11).



Sumber : TheCityUK Global Trends in Islamic Finance and The UK Market 2017 Diakses Tanggal 18/10/2017

Gambar 1. Global Trend in Islamic Finance and The UK Market

Sedangkan di Tahun 2017 dari gambar 1 di atas Aset bersih dana syariah secara keseluruhan di Inggris mencapai \$728 miliar berdasarkan laporan Global Trends in Islamic Finance and The UK Market. Terdapat juga sejumlah bank konvensional yang menyediakan layanan keuangan syariah dari Inggris pusat. Secara keseluruhan, ada lebih dari 20 bank di Inggris yang menawarkan layanan keuangan Islam. Hal ini melebihi jumlah di negara Barat lainnya. Bank-bank tersebut seperti yang sudah terdapat pada tabel 4.4 dan ditambah dengan bank yang beroperasi di Inggris seperti

Riyad Bank, Bahrain Middle East Bank, Habibsons Bank, dan Dallah Al-Baraka (Global Trends in Islamic Finance and The UK 2017: 3 & 10-11).

Laporan perkembangan terakhir *Islamic Finance Development Report* (2016) oleh perusahaan *Islamic Corporation For Development Of The Privat Sector* (ICD) atau Perusahaan Islam Untuk Pengembangan Sektor Swasta dan Thomson Reuters menempatkan Inggris di peringkat 22 dari 124 negara dalam hal penawaran keuangan Islam secara keseluruhan.

Tabel 3. Peringkat Perbankan Syariah di Negara Muslim dan Non-Muslim berdasarkan laporan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) :

No	Negara Pemimpin (Mayoritas Muslim)	Peringkat IFDI
1	Malaysia	12.3
2	Bahrain	87
3	Unite Arab Emirates	66
	Negara Mayorits Non Muslim	
1	Sri Lanka	24
2	Afrika Selatan	20
3	Singapura	18
4	Inggris	15
5	Philipina	6
	Rata-Rata Global	8.8

Sumber : TheCityUK Global Trends in Islamic Finance and The UK Market 2017 Diakses Tanggal 18/10/2017

Pada penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Inggris berada di peringkat ke 22 dari 124 negara dalam hal penawaran keuangan Islam berdasarkan laporan ICD Thomson Reuters 2016, melalui tabel 6 di atas juga menjelaskan bahwa hal tersebut

membuat Inggris di berada diperingkat pertama di Eropa, dan peringkat ke-empat di antara negara-negara berpenduduk mayoritas non-muslim setelah Sri Lanka, Afrika Selatan dan Singapura. Keuangan Islam memainkan peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur di Inggris.

Ini termasuk pembiayaan pembangunan untuk London Gateway, Olympic Village dan pembangunan kembali barak Chelsea. Lebih dari 6.500 rumah di Utara Barat dan Midland saat ini didanai oleh investasi sebesar 700 juta poundsterling oleh Gethouse Bank, sebuah bank umum syariah di Inggris. Tren saat ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan syariah dalam mendanai pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut dan tumbuh di tahun-tahun mendatang. (Global Trends In Islamic Finance and The UK Market 2017:6).

Bukan hanya di sektor pembiayaan infrastruktur saja, di sektor hukum, dua puluh lima firma hukum di Inggris memiliki departement keuangan Islam yang cukup besar dan keuangan Islam telah digambarkan sebagai 'salah satu bidang hukum yang paling cepat berkembang'. Demikian pula akuntan, konsultan, dan perusahaan jasa terbesar di Inggris yang saat ini menyediakan layanan konsultasi keuangan Islam ke semua klien. Pemerintah Inggris telah memainkan peran yang aktif dalam mengejar perkembangan sub-ekonomi Islam ini secara terampil. Tidak ada

keraguan bahwa pemerintah Inggris berharap akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan investasi dan aktivitas keuangan Islam yang bertujuan untuk menerapkan sejumlah mekanisme untuk memanfaatkannya (Rowley, 2014:79-80).

Bank Islam Britain (Islamic Bank of Britain)

Percobaan produk perbankan syariah di Inggris pertama kali di perkenalkan pada era 1990-an, meskipun dengan jumlah yang masih terbatas. Beberapa bank dari Timur Tengah mulai menawarkan produk sederhana seperti *home financing*. Namun dibandingkan dengan produk perbankan konvensional Inggris, harga produk syariah umumnya tidak kompetitif. Sehingga kaum muslimin Inggris masih kesulitan untuk mengakses atau pun menggunakan jasa perbankan syariah pada era tersebut. Pertengahan tahun 2004 merupakan awal kebangkitan Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi Islam (khususnya sektor perbankan) di negaranya dengan berdirinya IBB (*Islamic Bank of Britain*). Masyarakat muslim Inggris menyambut baik kehadiran bank Islam di negaranya tersebut. (Priambodo, 2012:36).

Islamic Bank of Britain dibentuk oleh sekelompok investor dari Timur Tengah untuk memanfaatkan pasar yang berkembang untuk layanan keuangan syariah yang sesuai di Inggris. Pada bulan juli 2002, konsultan dan penasihat dipekerjakan untuk mengkonfirmasi apakah jenis bank tersebut dibutuhkan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, FSA. Pada tahun awal 2003 para investor diundang, terutama

investor dari Teluk Persia, yang mengumpulkan dokumen-dokumen yang memungkinkan perusahaan untuk menaikkan modal sebesar 14 juta poundstreling.

Terbentuknya *Islamic Bank of Britain* (IBB) oleh sekelompok investor Timur Tengah ini merupakan hasil kerjasama *Islamic Joint Venture Partnersip* (IJVP) dengan kepemilikan saham perseorangan, yaitu dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi (<http://innocentwinx.blogspot.co.id> diakses 25/12/2017).

Produk yang ditawarkan *Islamic Bank of Britain* antara lain tabungan, rekening deposito dan rekening deposito berjangka. *Islamic Bank of Britain* menginvestasikan uang ini ke dalam perdagangan investasi yang sesuai dengan Sha'ria (www.Islamicbank.com diakses pada 10/10/2017). Setiap keuntungan dari investasi dibagi antara bank dan nasabahnya. Mereka juga menawarkan layanan kepada penabung non-Muslim yang lebih memilih untuk menghindari industri seperti tembakau atau alkohol (Ahmad, 2008: 25)

Di bulan Agustus tahun 2004, FSA memberikan otorisasi atas bank tersebut, dan kemudian menjadikan *Islamic Bank of Britain* tersedia untuk umum. Sama seperti semua lembaga keuangan lainnya, Bank terpengaruh secara negatif oleh krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007-2008. Meskipun demikian, IBB ini terus berkembang dan pada tahun 2012 mencapai tingkat tertinggi dalam sejarahnya dari aset

keuangan ritel dan saldo deposito (<https://en.wikipedia.org> Diakses pada 30/09/2017).

Namun pada bulan Desember 2014, Islamic Bank of Britain secara resmi mengganti namanya menjadi Al Rayan Bank PLC, untuk mencerminkan statusnya sebagai bagian dari grup perusahaan Masraf Al Rayan (MAR). Perubahan nama tersebut merupakan dimulainya babak baru bank sebagai perwakilan dari Masraf Al Rayan (MAR) di Eropa. MAR merupakan Bank terbesar dan terkaya kedua di Qatar. Kemudian berselang dua tahun yaitu pada bulan Desember 2016, Al Rayan Bank mengumumkan bahwa nilai aset Ritel dan komersialnya telah melampaui angka £ 1 milyar untuk pertama kalinya.

Oleh karena itu di tahun 2016 tersebut Al Rayan Bank dinobatkan sebagai bank dengan pertumbuhan tercepat ketiga di Inggris oleh “*Bank League Tables 2017*”, sebuah analisis lengkap dari seluruhnya yang berjumlah 155 bank yang tergabung di Inggris, yang diterbitkan *Searchline Publishing*. Hal ini dikutip pada tahun 2017 oleh bank yang mencatat keuntungan sebelum pajak sebesar £ 8,2 milyar dan mengumumkan bahwa mereka memiliki lebih dari 77.000 nasabah. Al Rayan Bank PLC adalah bank Inggris pertama yang mengklaim beroperasi secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Al Rayan Bank menyambut orang-orang dari semua agama dan menjadi semakin populer di kalangan non-muslim.

Al Rayan Bank adalah bank ritel yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Al Rayan Bank telah merintis perbankan syariah Inggris sejak 2004. Dengan hanya berfokus pada aktivitas perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, Al Rayan Bank mampu membuat perbedaan yang signifikan bagi umat Islam di seluruh Inggris, membantu mereka menyelamatkan masa depan keluarga mereka, memperluas bisnis mereka atau membeli rumah mereka sendiri, tanpa mengorbankan keyakinan mereka.

Dalam menjalankan aktivitasnya Al Rayan Bank tetap akan diawasi oleh komite pengawas Syariah independen dan kantor syariah khusus. Al Rayan Bank memiliki Pejabat Kepatuhan Syariah yang berdedikasi dan merupakan ahli syariah yang dihormati, yang disebut Komite Pengawas Syariah, yang bertindak sebagai badan independen untuk menjamin bahwa produk dan aktivitasnya sesuai dengan syariah.

Al Rayan Bank akan terus beroperasi sebagai bank yang tunduk pada peraturan perbankan Inggris. Dana Nasabah akan tetap dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan di negara itu. Dengan jaringan kantor cabang dan kantor yang strategis di seluruh Inggris, pusat kontak yang sangat terlatih, layanan perbankan online yang aman dan telepon perbankan otomatis 24 jam, Al Rayan Bank menyediakan layanan penyimpanan, keuangan dan transaksi syariah yang sesuai untuk lebih dari 60.000 bisnis pribadi dan bisnis utama pelanggan (www.alrayanbank.co.uk).

Mengenai *re-branding* aktivitas dari Islamic Bank of Britain ke Al Rayan Bank telah dimulai sejak Oktober 2014 dan diresmikan oleh para pemegang saham. Dengan demikian, bank akan segera memperkenalkan logo baru Al-Rayan Bank dan mengimplementasikan identitas lainnya di seluruh situs, dokumen, dan cabang bank.

Regulasi Perbankan Syariah

(Ahmed, 2014:23-24) menjelaskan, Aturan hukum di mana perbankan Islam beroperasi dapat di bagi menjadi tiga jenis. Kelompok negara pertama memiliki sistem hukum Islam. Negara-negara ini termasuk Iran, Arab Saudi dan Sudan. Iran mengadopsi sistem hukum Islam setelah revolusi tahun 1979. Undang-undang perbankan syariah disahkan pada tahun 1983 untuk mencakup semua operasi perbankan. Sudan mengubah sektor perbankan menjadi Islam pada tahun 1980-an dan memberlakukan undang-undang transaksi Islam di tahun 1984 (Ahmed, 2014:23).

Kelompok kedua, negara yang memiliki sistem hukum Barat yang dominan namun tetap memperkenalkan hukum perbankan Islam untuk memberikan dasar hukum bagi praktik dan transaksi keuangan Islam. Negara-negara dalam kelompok ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan hukum umum dan yang memiliki hukum perdata. Contoh negara hukum umum dengan hukum perbankan syariahnya adalah negara Malaysia dan Pakistan.

Malaysia memberlakukan undang-undang perbankan syariah (IBA 1983) dan undang-undang bank dan lembaga keuangan (BAFIA 1993, Diubah) untuk memenuhi praktik perbankan Islam. Negara Pakistan mengubah undang-undang untuk mengakomodasikan keuangan Islam termasuk berlakunya undang-undang perbankan dan jasa keuangan tahun 1984. Ada beberapa negara dengan hukum umum lainnya, seperti Negara Bangladesh di mana perbankan Islam tercakup dalam bagian undang-undang perbankan yang ada (Ahmed, 2014:23).

Kelompok ketiga, adalah negara-negara di mana lembaga keuangan Islam beroperasi di bawah sistem hukum barat tanpa hukum perbankan syariah yang mendukung. Di negara-negara ini, produk keuangan Islam harus menyesuaikan diri dengan undang-undang perbankan yang ada. Praktik keuangan Islam di bawah aturan hukum Barat, bagaimanapun juga dipengaruhi oleh pendekatan otoritas pengatur terhadap perbankan Islam. Di negara-negara di mana otoritas pengatur menyesuaikan diri dengan perbankan syariah, bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dapat dibentuk berdasarkan kerangka hukum non-Islam (Ahmed, 2014:24).

a. Financial Service Authority (FSA)

Inggris menjadi negara yang telah berhasil memperkenalkan perbankan syariah dengan dukungan proaktif dari otoritas pengatur tanpa memperkenalkan hukum perbankan syariah yang spesifik. Selain itu, Inggris telah menjadi pintu gerbang keuangan Islam

untuk masuk ke Eropa, yang sebagian mencerminkan peran London sebagai pusat keuangan internasional terkemuka (Wilson, 2007:3). Namun, untuk menempatkan perbankan syariah agar sejajar dengan bank konvensional, beberapa undang-undang perpajakan diubah. Misalnya, undang-undang perpajakan tersebut diubah pada tahun 2003 untuk menghilangkan pajak transfer real estate ganda (materai) untuk hipotek Islam. Baru-baru ini kerangka pajak diubah pada tahun 2008 dan 2009 untuk memungkinkan penerbitan obligasi syariah atau sukuk. Sedangkan Landasan hukum dan aktifitas perbankan syariah di UK dituangkan dalam undang-undang “Financial Services and Markets Act 2000”(FSMA) (Ahmed, 2014:23-24).

FSA di Inggris merupakan sebuah badan kuasiperadilan independen nonpemerintah dan sebuah perusahaan yang dibatasi menurut jaminan (nirlaba), yang mengatur industri jasa keuangan Islam di Inggris, diberikan wewenang hukum berdasarkan *Financial Services and Markets Act 2000* (FSMA, Undang-Undang tahun 2000 tentang jasa keuangan dan pasar keuangan) (Asyraf, 2015:796).

Bank Of England (BoE) dan *Financial Service Authority* (FSA) merupakan dua regulator perbankan yang telah dibuka untuk pengembangan keuangan Islam di negara Inggris. Sektor keuangan Islam beroperasi dibawah satu undang-undang yang berlaku untuk

semua sektor, yaitu *Financial Services and Markets Act. 2000* (FSMA).

Siapa pun yang ingin melakukan aktivitas yang diatur di Inggris diharuskan mengajukan permohonan ke FSA untuk mendapatkan izin berdasarkan Bagian IV dari *Financial Services and Markets Act. 2000* (FSMA) . FSMA menangani peraturan layanan keuangan di Inggris dan merupakan undang-undang di mana badan-badan perusahaan, persekutuan, perseorangan, dan asosiasi yang tidak berbadan hukum diizinkan oleh FSA untuk melakukan kegiatan keuangan yang tunduk pada peraturan (FSA Islamic Finance in the UK, 2007:10).

FSMA memungkinkan pengadaaan rezim nondiskriminasi ketika mengesahkan lembaga-lembaga keuangan Islam, yakni semua bank perlu memenuhi kondisi-kondisi ambang, terutama Manajemen yang andal, sumber daya keuangan yang kuat, dan sistem-sistem & kontrol yang efektif. Di dalam kebijakan ini, terdapat ruang fleksibilitas tertentu. Pada kasus bank Islam, FSA telah memberlakukan prinsip-prinsip yang sama, yang berarti karakteristik khusus bank Islam dapat diakomodasi dengan mengadakan dialog seksama dan persiapan cermat (Asyraf, 2015:796).

Kebijakan FSA tentang IFIs, dan bahkan segala perusahaan jasa keuangan yang baru atau inovatif, secara sederhana dapat dikatakan

tanpa hambatan dan tanpa bantuan khusus, karena FSA bersemangat untuk menggiatkan kompetisi antara penyedia jasa keuangan konvensional dan penyediaan jasa keuangan Islam (Asyraf, 2015:796).

Lebih jauh lagi, FSA tidak secara eksplisit mengatur kepatuhan produk-produk keuangan Islam terhadap syariah, melainkan mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas melalui penjelasan tentang produk-produk dan risiko-risiko terkait. Lembar fakta tentang rencana pembelian rumah (*home purchase plane*, HPPs) yang diterbitkan pada bulan Maret 2007, merupakan sebuah contoh bagus, mengemukakan pesan-pesan kunci bagi para pelanggan, memberikan panduan langkah per langkah berkenaan dengan masing-masing produk, serta risiko-risiko dan manfaat-manfaat terkait. Dengan cara ini, FSA dapat menyediakan sebuah platform peningkatan kesadaran publik, tetapi FSA jelas akan mengandalkan dukungan dari lembaga, organisasi, badan swasta dan badan resmi lainnya yang terlibat dalam sektor ini (Asyraf, 2015:797).

Namun pada tahun 2013 *Financial Service Authority* (FSA) dibubarkan atas desakan dari parlemen Inggris. Dibubarkannya FSA ini menurut sejumlah pakara ekonomi dikarena beberapa alasan *Financial Service Authority* (FSA) di Inggris. Seperti efektivitas komunikasi FSA dengan Bank of England dan departemen keuangan, FSA melalaikan tugasnya dalam mengawasi perbankan

secara sistematis, dan FSA dianggap terlalu fokus pada tugas pengawasan kegiatan bisnis dan melupakan pengawasan individual bank.

Setelah pembubaran FSA, sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Gerver Osborne tanggung jawab FSA akan dibagi di antara sejumlah agensi baru dan BOE, *Consumer Protection and Markets Authority* (pihak otoritas “perlindungan konsumen” dan pasar) akan bertanggungjawab menjaga ketertiban kota dan sistem perbankan. *Prudential Regulatory Agency* (Agensi Regulasi Standar Kehati-hatian) yang baru akan menjalankan regulasi standar kehati-hatian firma-firma keuangan, termasuk bank, bank investasi, koperasi simpan pinjam, dan perusahaan asuransi). Semua tanggung jawab lain akan dipangku oleh BOE, yang mana akan membentuk *Financial Policy Committee* (Komite Kebijakan Keuangan) (Asyraf, 2015:798).

Tabel 4. Pengembangan regulator keuangan di Inggris

No	Tahun	Pengembangan Regulator Keuangan di Inggris
1	2001	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bank of England</i> membentuk <i>Islamic Finance Working Group</i> yang diketuai oleh Lord George untuk menyelidiki hambatan yang dihadapi industri dan memungkinkan pengembangan keuangan Islam di Inggris.
2	2003	<ul style="list-style-type: none"> - HM Treasury dan HM Revenue & Customs Tax Technical Group dibentuk untuk memahami secara rinci dan spesifik mengenai sifat teknis keuangan syariah. - Undang-Undang Pajak Bea Masuk Jenis Usaha (SDLT): Melayani untuk orang-orang yang menggunakan pengaturan pembiayaan properti alternatif (yang mencakup hutang syariah), menghapus biaya ganda untuk SDLT yang mungkin menghapus biaya ganda untuk SDLT yang mungkin timbul yaitu lembaga keuangan membeli properti dan menjualnya kembali ke individu
3	2005	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan SDLT telah diperpanjang ke dalam susunan bagi hasil dan pada tahun 2006 kepada perusahaan. - Pemerintah mengatur instrumen Murabaha sebagai pengaturan pembelian dan penjualan kembali.
4	2006	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HTM Treasury Islamic Finance Expert's Group</i> dibentuk untuk memberi nasehat kepada Pemerintah mengenai cara terbaik untuk mendukung pengembangan Keuangan Islam di Inggris. Perwakilan dari kelompok tersebut berasal dari pemerintah, firma hukum dan penasihat, dan dari Komunitas Muslim

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Diundang untuk mengurangi Musharaka atau mengurangi kepemilikan bersama untuk pengaturan aset properti. - Bantuan SDLT diperluas ke entitas perusahaan
5	2007	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Inggris mulai meninjau kembali kelayakan penerbitan Sukuk Pengambilan Modal. - Peraturan FSA tentang Rencana Pembelian Rumah Tangga. - Pedoman HMRC tentang perlakuan pajak atas segala jenis pembiayaan yang meliputi. <ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan modal. - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Capital Gain Tax (CGT)
6	2008	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Pemerintah Inggris tentang penerbitan Sukuk yang potensial.
7	2011	<ul style="list-style-type: none"> - UK Islamic Finance Sekretariat (UKIFS): Mendukung Promosi dan Pengembangan Keuangan Islam di Inggris.
8	2013	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Tugas Keuangan Islam (IFTF): IFTF adalah Satuan Tugas yang dipimpin oleh menteri yang dibentuk untuk mempromosikan Inggris sebagai pusat Keuangan Islam dan untuk menarik investasi.

Sumber : UK Excellent in Islamic Finance gov.uk/ukti Diakses Tanggal 13/10/2017

Dari tahun tahun ke tahun regulator keuangan di Inggris mengalami perkembangan yang baik. Terbukti dari tahun 2001 sampai tahun 2013 pemerintah Inggris membentuk beberapa regulator keuangan dan peraturan untuk pengembangan keuangan Islam, seperti UK Islamic Finance Sekretariat (UKIFIS) yang

dibentuk untuk mendukung promosi dan pengembangan keuangan Islam di Inggris.

Hal penting lain dari perkembangan London dan Inggris sebagai pusat utama keuangan Islam yaitu Inggris memiliki beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung yang ditujukan untuk memperluas produk-produk Islam di pasar, baik itu intitusi syariah maupun perusahaan konvensional yang menawarkan keuangan Islam.

Perkembangan keuangan Islam di Inggris telah mendapat dukungan dari partai politik selama dekade terakhir. Ada dua tujuan kebijakan utama. Pertama, untuk membangun dan memelihara London sebagai pintu gerbang Eropa menuju keuangan Islam internasional. Dan kedua, untuk memastikan bahwa tidak ada orang Inggris yang ditolak untuk mengakses produk keuangan dengan harga yang bersaing karena keyakinan mereka. (Global Trends In Islamic Finance In The UK Market, 2017:10).

Pemerintah Inggris membolehkan bank-bank konvensional seperti Lloyds TSB, Barclays, dll membuka layanan rekening simpanan syariah. Bank asing seperti HSBC amanah juga beroperasi di Inggris. Pemerintah juga mengembangkan industri pembiayaan Islami (*Islamic mortgage*) dengan jumlah asset diperkirakan USD14 miliar per tahun. Sementara untuk aturan perpajakan untuk transaksi syariah tidak secara spesifik menggunakan istilah Arab namun

diterjemahkan ke istilah umum agar kontrak-kontrak syariah tidak terkesan hanya untuk kalangan muslim (Ismail, 2012:9-10).

b. Dewan Syariah dan Tata Kelola Bank Syariah di Inggris

Dewan syariah adalah penafsir tunggal dan eksklusif dari hukum Islam dalam sebuah bank syariah yang memiliki wewenang untuk mengizinkan atau menghentikan transaksi atas pengenalan jenis baru produk keuangan atas dasar agama syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Amanah Dewan Syariah adalah untuk mengevaluasi dan menyetujui atau pun menolak dokumen atau transaksi kontraktual serta untuk mengawasi semua bank, memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Para pemegang saham dan deposan lembaga keuangan syariah mengharapkan hal yang pasti bahwa transaksi yang tidak sesuai dengan syariah harus ditolak atau pun dihapuskan. Hal ini berupa transaksi perdagangan barang-barang terlarang seperti pornografi, daging babi, alkohol maupun minuman keras lainnya. Mekanisme kelembagaan yang dituntut untuk memberlakukan hal-hal tersebut adalah Dewan Syariah (Anggraeni, 2017).

Peraturan dan kebijakan yang berlaku bagi bank syariah yang berada di Inggris mengandung ketegangan yang bahkan mungkin akan naik ke tingkat kontradiksi tanpa diperlakukan adanya penyesuaian. Terdapat dua kontradiksi yang menghasilkan

ketegangan, yaitu : 1). Perbankan dan keuangan syariah harus didorong setara dengan bank konvensional, dan 2). Perusahaan (termasuk bank) harus mematuhi standar tata kelola di mana mereka bertanggungjawab terhadap dewan komisaris mereka, pemegang saham, ataupun wilayah pemegang saham yang paling besar.

Bank-bank syariah di Inggris merupakan perusahaan publik yang dibatasi oleh saham. Mereka memiliki dua struktur dewan yang terdiri dari Dewan Manajemen dan Dewan Syariah. Perusahaan di Inggris tidak menentukan apakah satu atau dua dewan yang dibutuhkan. Undang-Undang Tahun 2006 (*Companies Act. 2006*) hanya menyebutkan jumlah minimum direktur dan tidak menentukan apakah direksi harus bertindak sebagai Dewan Pengurus. Struktur dua dewan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Inggris ini tidak bermasalah secara hukum (Scott, 2014:98-99).

Setidaknya sejak tahun 2000, pemerintah Inggris dan FSA agak mendukung keuangan Islam. Sir Howards Davies, yang saat itu menjabat sebagai ketua FSA mengatakan pada tahun 2003 bahwa Inggris memiliki “kepentingan ekonomi yang jelas untuk memastikan bahwa kondisi pasar Islam yang berkembang di London dan bank-ban Islam yang dikelola dengan baik akan menjadi baik untuk konsumen muslim, bagus untuk inovasi dan keragaman di pasar kita dan bagus untuk London sebagai pusat keuangan internasional”.

Pemerintah Inggris telah berusaha menjadikan Inggris sebagai sebuah yuridiksi yang bersahabat untuk perbankan dan keuangan Islam melalui proses promosi dan kebijakan. Sejak tahun 1990 tata kelola perusahaan dan beasiswa mengenai hal ini semakin penting, dengan tujuan untuk menemukan dan menerapkan cara yang lebih baik guna mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan (Scott, 2014:99-100).

c. Risiko Dan Tantangan Keuangan Islam

FSA mengharapkan semua perusahaan yang berwenang untuk mengidentifikasi, memantau dan mengurangi risiko yang dihadapi. Tidak terkecuali perusahaan Islam meskipun ada banyak risiko yang umum terjadi padaperusahaan-perusahaan Islam dan konvensional pengalaman FSA menunjukkan ada beberapa risiko yang spesifik bagi perusahaan-perusahaan Islam. FSA melihat beberapa bagian risiko ini, daftar dari FSA ini tidak lengkap dan tidak semua risiko berlaku untuk semua perusahaan Islam. Terdapat juga perbedaan dalam praktik manajemen risiko perusahaan Islam dan perusahaan konvensional yang beroperasi di *Islamic windows* (Michael *et. al.* 2007:16)

1) Syariah ‘arbitrase’

Terdapat banyak sekali pendapat mengenai apakah praktik atau produk tertentu sesuai dengan syariah. Ini berarti bahwa beberapa produk dan layanan dapat disetujui sebagai syariah

yang sesuai dengan beberapa cendekiawan syariah namun tidak oleh orang lain pada tingkat global, persetujuan produk dan layanan perusahaan Islam mungkin juga bergantung pada yuridiksi yang akan ditawarkan. Hal ini dapat menambah kompilasi bagi regulator lainnya.

FSA mendukung langkah-langkah untuk mengembangkan standar syariah yang umum oleh organisasi seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam atau *Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Michael *et. al.* 2007:16).

2) Kepatuhan Syariah

Bagi penyedia keuangan Islam mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atau *Shariah Supervisory Board* (SSB) mengenai kepatuhan produk syariah sebelum diluncurkan sangat penting sama pentingnya bagi perusahaan dalam mengakui bahwa kepatuhan syariah merupakan proses berkelanjutan yang berarti produk dan layanan mereka dipantau secara memadai. Tidak seperti keuangan konvensional, hal ini berimplikasi pada persyaratan kehati-hatian perusahaan Islam dan juga perilaku bisnis.

Beberapa produk jika melanggar peraturan kepatuhan syariah, dapat mempengaruhi solvabilitas perusahaan dengan

cara menguba aset menjadi liabilitas di neraca. Pemantauan kepatuhan syariah secara efektif oleh perusahaan Islam mungkin melibatkan pengentasan pengawasan SSB yang lebih jauh melalui proses Audit Syariah Internal dan dengan mengembangkan lebih banyak pengetahuan dan keahlian di dalam perusahaan (Michael *et. al.* 2007:16-17).

3) Isu Untuk Cendikiawan Syariah

Kekurangan para cendikiawan syariah yang memenuhi syarat dengan tepat di industri keuangan Islam hal ini berarti umum bagi para cendikiawan individual untuk memegang posisi di Dewan Pengawas Syariah dari sejumlah perusahaan Islam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan Dewan Pengawas Syariah atau *Shariah Service Board* (SSB) untuk memberikan tatangan dan pengawasan yang cukup ketat terhadap produk dan layanan perusahaan. Masalah lainnya adalah di mana SSB bertanggungjawab atas audit syariah tahunan dan juga menyetujui produk untuk kepatuhan syariah. Seperti perusahaan konvensional, FSA ingin melihat konflik ini diakui dan dikelola dengan hati-hati (Michael *et. al.* 2007:17).

4) Sumber Daya Manusia

Sudah diakui secara luas bahwa terdapat kekurangan-kerungan profesionalitas yang berpengalaman di sektor keuangan Islam. Padahal sudah elas ada ruang lebih banyak

untuk pendidikan dan pelatihan keuangan Islam di Inggris. Kekurangan sumber daya juga meluas ke sarjana syariah yang memiliki pengalaman perbankan yang relevan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa perusahaan telah menempatkan ilmuwan yang kurang berpengalaman bersama orang-orang yang berpengalaman di SSB mereka, sehingga membantu mengembangkan ilmuwan yang lebih berpengetahuan luas (Michael *et. al.* 2007:17) .

5) Risiko Kontrak

Dalam kontrak untuk transaksi Islam, penegakan syarat dan ketentuan tergantung pada hukum yang mengaturnya. Dalam kasus perselisihan, tidak mungkin pengadilan Inggris akan memberikan putusan berdasarkan hukum syariah.

Untuk mengurangi risiko ini kontrak harus ditulis dengan hati-hati untuk meminimalkan potensi perselisihan dan negara hukum yang mengatur. Hal ini telah dipahami baik oleh perusahaan. Saat ini, kebanyakan kontrak Islam diatur oleh hukum Inggris, dan beberapa berada di bawah undang-undang New York (Michael *et. al.* 2007:17).

d. Basel 2 dan Manajemen Risiko

Kerangka risiko model Basel 2 yang baru-baru ini diperkenalkan di Inggris dalam bentuk *Capital Requirements Directive*. Basel 2 merupakan revisi dari kesepakatan Basel yang ada

yang bertujuan untuk membuat kerangka kerja lebih sensitif terhadap risiko dan mewakili praktik manajemen risiko bank modern (Michael, 2007:19). Basel 2 disepakati pada tahun 2004 dan bergantung pada tiga elemen pelengkap atau pilar. Pilar pertama menetapkan persyaratan modal minimum berdasarkan penerapan bobot risiko terhadap aset bank.

Selain membutuhkan cadangan modal untuk risiko pasar, risiko operasional sekarang dapat diimbangi dengan modal, dan penekanannya telah ditempatkan pada pengurangan risiko kredit. Pilar dua mengamankan tinjauan pengawasan, termasuk penilaian terhadap sistem dan pengendalian internal bank, serta prosedur manajemen risiko. Penilaian ini dapat menghasilkan penyesuaian tingkat modal pada pilar 1. Akhirnya, pilar 3 menyerukan disiplin pasar yang lebih ketat termasuk peraturan rinci tentang keterbukaan dan transparansi (Jonathan, 2011:338-339).

Jika dalam praktiknya risiko tertentu mempengaruhi institusi Islam lebih dari perusahaan konvensional, FSA memperkirakan hal ini dapat diidentifikasi dan dihitung melalui pilar 2. Namun jika hal ini tidak memungkinkan atau modal bukanlah alat mitigasi yang tepat, maka cara lain untuk mengelola risiko ini perlu diidentifikasi. Sama dengan perusahaan konvensional, hal ini akan mencakup tata kelola perusahaan yang baik dan sistem kontrol yang tepat. (Michael et. al. 2007:19).

B. Analisis Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Perbankan Syariah di Inggris

Estimasi yang dikeluarkan oleh IMF bahwa aset perbankan syariah akan tumbuh sekitar 15% per tahun, dengan nilai aset akan mencapai US\$ 1 Triliun pada 2016. Pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah tidak terlepas dari dana-dana konglomerat Timur Tengah yang keluar dari Amerika pasca tragedi 11 September. Jumlah dana tersebut disinyalir terus bertambah sebesar hingga angka triliunan US dolar karena *wind fall profit* kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2008-2009 lalu.

Dari data yang dikeluarkan oleh The Banker pada tahun 2009, ternyata ada tiga negara yang memiliki aset perbankan syariah terbesar yaitu negara Iran, Arab Saudi dan Malaysia. Sedangkan untuk Indonesia berada di posisi ke-17 dan yang menjadi perhatian khusus adalah negara Inggris yang notabene berpenduduk mayoritas non-muslim tetapi mampu menembus posisi ke-8 besar (Irvani, 2016:130-131).

Pertumbuhan keuangan syariah yang sangat pesat di Inggris ini melebihi sebagian negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Menurut Michael Ainley dkk, Rodney Wilson dan Irvani ada beberapa faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Inggris, di antaranya yaitu:

1. Ekspansi global keuangan Islam

Pengalaman pertama perbankan Islam di zaman modern nampaknya berada di Timur Tengah pada tahun 1960. Saat ini pasar

keuangan syariah diperkirakan sekitar £ 250bn secara global. Ada juga sekitar 300 lembaga keuangan di seluruh dunia yang menawarkan produk syariah. Tidak mengherankan, pertumbuhan industri di Timur Tengah dan Asia Tenggara telah mempengaruhi pasar Inggris. Awalnya, produk yang dibuat di pasar tradisional dibawa ke Inggris oleh beberapa pengusaha industri utama, namun kini produk yang dikembangkan di London dipasarkan di negara lain, misalnya di Timur Tengah (Michael et. al. 2007:7).

2. Pengatur Keuangan Tunggal

Faktor lainnya adalah regulator. Pembentukan *Financial Service Authority* (FSA) pada tahun 1997 menggabungkan 11 regulator yang berbeda ke dalam satu tubuh di bawah satu kesatuan undang-undang. Hal ini sudah dilakukan untuk menyelesaikan beberapa komplikasi dan pandangan yang bertentangan yang berasal dari rezim peraturan sebelumnya di mana fungsi kelembagaan di bagi ke dalam beberapa sektor. Secara khusus, FSA dapat melihat keseluruhan siste secara keseluruhan, untuk menilai lembaga dan produk keuangan Islam (Michael et. al. 2007:8).

3. Kelebihan Likuiditas di Timur Tengah

Kenaikan tajam harga minyak seak tahun 2003 telah menghasilkan surplus likuiditas yang sangat besar dan lonjakan permintaan untuk aset Islam dan konvensional di negara-negara kawasan Teluk. Namun kapasitas pasar belum bisa mengimbangi

permintaan yang tinggi akibatnya permintaan melampaui pasokan dan investor dari Timur Tengah berusaha untuk mencari alternatif yang sesuai.

Hal ini segera diidentifikasi oleh institusi Islam dan konvensional yang menyediakan aset yang dijual ke para investor dengan cara syariah. Contohnya yaitu akuisisi Aston Martin oleh dua lembaga keuangan Kuwait dengan menggunakan pembiayaan sesuai syariah (Michael *et. al.* 2007:7-8).

4. Islamic Windows

Beberapa lembaga internasional besar seperti Citi, Deutsche, dan HSBC telah ada di Timur Tengah dan Asia Tenggara selama beberapa tahun. Akibatnya, mereka telah mengembangkan banyak pengetahuan dan pengalaman pasar lokal, termasuk produk-produk yang Islami. Hal ini juga menjadikan tantangan bagi *Islamic Bank of Britain* (IBB) yang merupakan Bank pendatang baru untuk bersaing di pasar keuangan dengan layanan perbankan konvensional yang sudah ada sejak lama dan menawarkan produk syariah.

Untuk mengakomodasi permintaan produk syariah yang baru dan terus berkembang, mereka telah menetapkan lini bisnis yang dikenal sebagai '*Islamic windows*', beberapa di antaranya berbasis di Inggris dan lainnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sistem ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan keuangan Islam karena pengalaman global lembaga

dalam pengembangan produk dan akses mereka ke sumber daya jauh lebih besar dari pada yang tersedia untuk lembaga lokal di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Michael *et. al.* 2007:7).

5. Perkembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tentang Keuangan Syariah

Perkembangan lembaga pendidikan dan pelatihan tentang perbankan dan keuangan syariah, faktor yang juga memengaruhi perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Inggris adalah banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menawarkan berkaitan dengan perbankan dan keuangan syariah. Seperti pada laporan ICD Thomson Reuters tahun 2016 bahwa terdapat sekitar 201 lembaga pendidikan dan 622 lembaga pelatihan di seluruh dunia yang menawarkan pendidikan perbankan dan keuangan Islam.

Sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 terdapat 2.224 penelitian keuangan Islam yang dihasilkan, 1.567 artikel jurnal keuangan Islam diulas dan 121 kualifikasi profesional yang disediakan. Dari hasil penelitian tersebut, ada 3 besar negara-negara yang paling produktif dalam melakukan penelitian yakni negara Malaysia dengan 833 penelitian, Inggris dengan 160 penelitian dan Indonesia dengan 145 penelitian (Irvani, 2016:137).

Berikut merupakan 10 negara yang menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang keuangan syariah :

Tabel 5. Data kuantitatif 10 Negara yang Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Syariah

No	Negara	Lembaga Pendidikan (<i>Degree</i>)	Lembaga Pelatihan (<i>Course</i>)
1	United Kingdom	27	69
2	Malaysia	38	60
3	Indonesia	21	60
4	United Arab Emirates (UAE)	16	48
5	Pakistan	14	33
6	Saudi Arabia	4	25
7	Jordan	5	22
8	India	10	17
9	Bahrain	4	17
10	United State Amerika (USA)	2	16

Source : ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development Report 2016 Diakses Tanggal 1/11/2017

Jika dilihat dari data tabel 8 di atas berdasarkan laporan dari ICD Thomson Reuters 2016 Inggris memiliki jumlah institusi tertinggi yang menawarkan lembaga pelatihan keuangan Islam, kemudian diikuti oleh Malaysia dan Indonesia. Tapi, dalam lembaga pendidikan keuangan syariah, Inggris menempati urutan kedua yang menawarkan 27 lembaga pendidikan keuangan Islam di seluruh negara dan di urutan pertama yaitu negara Malaysia.

Eropa menunjukkan minat yang tinggi terhadap pendidikan keuangan Islam, Inggris menyumbang 63% dari total pendidikan keuangan Islam di Eropa. Lainnya adalah Turki 11 institusi, Prancis 7 institusi, Swiss 4 institusi, Malta 4 institusi, Jerman 3 institusi, Luksemburg, Bosnia masing-masing 2 institusi, Polandia, Guernsey, Italia, Irlandia, Spanyol, Belanda dan Belgia masing-masing 1 institusi (Islamic Development Report, 2016:88-89).

Di antara Universitas-Universitas di Inggris yang menawarkan pendidikan keuangan dan perbankan Islam yaitu Aston University (Birmingham), Bangor University (Wales), Cambridge University (Cambridge), Cardiff Metropolitan University (Wales), Bolton University (Manchester), Markfield Institute of Higher Education (MIHE) (Leicester), Durham University (Durham), Reading University (London), Newcastle University (Newcastle), The Oxford Center of Islamic Studies Oxford University (Oxford), East London University (London), Salford University (Manchester), City University (London) Aberdeen University (Scotland), South Wales University (Wales), Dundee University (Scotland), London School of Business and Economics (London) (UK Excellent in Islamic Finance gov.uk/ukti, 15-26).

